

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====

Tahun Sidang : 2010 - 2011
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menko Polhukam
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Agustus 2010
Pukul : 19.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : R.R. Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
Acara : 1. Pembukaan
2. Penjelasan oleh Menko Polhukam
3. Tanya Jawab
4. Penutup

Hadir Anggota : ... Anggota dari 48 Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menko Polhukam, Sdr. Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
Mendagri, Sdr. Gamawan Fauzi
Menlu, Sdr. Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil, B.Sc.
Menkumham, Sdr. Patrialis Akbar
Panglima TNI, Sdr. Jenderal TNI Djoko Santoso
Kepala BIN, Sdr. Jenderal (Purn) Pol. Sutanto
Kapolri diwakili oleh Irwasum, Sdr. Komjen Pol. Nanan Sukarna
Beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN :

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menko Polhukam pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2010 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN KOMISI I DPR RI :

1. Komisi I DPR RI menggarisbawahi arti penting pembangunan kekuatan maritim yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah laut, serta menegakkan hukum dan menjaga sumber daya kekayaan laut demi kepentingan nasional. Dalam hubungan ini Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan kekuatan maritim, dan segera melakukan proyeksi pembangunan kekuatan maritim yang didukung oleh infrastruktur dan Alutsista yang memadai.
2. Terkait dengan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Bakorkamla serta mengkaji ulang berbagai Undang-Undang sektoral yang terkait dengan pengamanan maritim. Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian terhadap alokasi APBN 2011.
3. Dalam rangka mendukung upaya pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan, khususnya batas wilayah laut, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan berbagai perundingan segmen-segmen wilayah laut yang masih belum terselesaikan, dengan mengedepankan harkat dan martabat bangsa, dalam kerangka waktu tertentu.
4. Dalam hal penanganan terhadap dinamika permasalahan bilateral terkait dengan wilayah perbatasan, Komisi I DPR RI mengingatkan kembali pemerintah agar dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri dapat menciptakan kebijakan hubungan yang setara, saling menghormati dan saling menghargai

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 01.00 WIB.

KETUA RAPAT,

DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si

A-73

